



**Judul** : Anggaran 2018 tidak Populis  
**Tanggal** : Kamis, 26 Oktober 2017  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 2

# Anggaran 2018 tidak Populis

*Pemerintah berharap semakin banyak penduduk di Tanah Air menikmati akses pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya.*

TESA OKTIANA SURBAKI  
tesa@mediaindonesia.com

**P**EMERINTAH menepis penilaian sejumlah kalangan yang menyatakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 cenderung populis seiring memasuki tahun politik.

Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, penyusunan APBN sejak 2015 justru mencerminkan Nawa Cita yang merupakan visi misi Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kebijakan menjelang tahun politik kerap dianggap populis. Contohnya, kenaikan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Padahal, sebelum memasuki tahun politik, PKH tidak pernah dinilai populis. Saya ingin mendukung fokus Presiden dalam Nawa Cita adalah memeratakan pembangunan dan kesejahteraan. Membangun dari pinggiran atau Indonesia sentris,” kata Sri dalam konferensi pers di kantornya, kemarin.

Menkeu menekankan sudah menjadi kewajiban presiden menyejahterakan masyarakat dengan menggunakan instrumen berkelanjutan. Apalagi arah kebijakan APBN mendorong kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan merupakan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

“Kelompok (masyarakat) miskin membutuhkan pendidikan, akses kesehatan, air bersih, hingga listrik. Oleh karena itu, Presiden meminta semua itu diwujudkan melalui kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS), dan pembangunan puskesmas. Sebenarnya itu tidak populis, tetapi kewajiban pemerintah untuk pembangunan,” ujar Sri Mulyani.

Pada 2018 pemerintah menargetkan angka kemiskinan sekitar 9,5%-10%, penurunan ketimpangan melalui indeks gini ratio diproyeksikan 0,38, tingkat pengangguran ditargetkan 5%-5,3%, dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,5.

Dalam APBN 2018, angka belanja negara ditetapkan Rp2.220,7 triliun yang meliputi pemerintah pusat Rp1.454,49 triliun, transfer ke daerah, dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun. Dalam belanja pemerintah pusat, kementerian/lembaga diangarkan Rp847,44 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp607,06 triliun (lihat grafik).

## Gedung baru DPR

Dalam Rapat Paripurna DPR, kemarin, dari 10 fraksi yang hadir menyampaikan pandangan hanya Fraksi Partai Gerindra menolak RUU APBN 2018 menjadi un-

dang-undang. Namun, Partai Gerindra memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan keyakinan atas postur anggaran tersebut. Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima dengan catatan.

“Apakah pembahasan RUU APBN 2018 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.

Taufik menambahkan APBN 2018 yang disetujui tersebut sudah mencakup nomorklatur Kesetujuan DPR. Akan tetapi, dia tidak menjelaskan detail anggaran

untuk pembangunan gedung DPR.

“Urusan desain, struktur bangunan, lansekap hingga waktunya kami serahkan kepada pemerintah,” ungkap Taufik.

Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid merinci proyek bernilai Rp601 miliar itu mencakup pembangunan gedung baru sebesar Rp320,44 miliar dan alun-alun demokrasi sebesar Rp280 miliar. Anggaran Rp601 miliar masuk ke bagian nomenklatur Kesetujuan DPR. Anggaran untuk ke-sekretariatan total Rp1,7 triliun, kemudian anggaran untuk satuan kerja dewan Rp4 triliun. DPR mendapatkan total anggaran Rp5,7 triliun untuk operasional di tahun depan. (Nov/Ant/X-3)

Postur APBN dan Penanggulangan Kemiskinan 2018  
(Rp triliun)

	2017 Outlook	2018		Selisih
		RAPBN	APBN	
A. Pendapatan negara	1.736,1	1.878,4	1.894,7	16,3
I. Pendapatan dalam negeri	1.733,0	1.877,3	1.893,5	16,3
1. Penerimaan perpajakan	1.472,7	1.609,4	1.618,1	8,7
2. Penerimaan negara bukan pajak	260,2	267,9	275,4	7,6
II. Penerimaan hibah	3,1	1,2	1,2	0,0
B. Belanja negara	2.098,9	2.204,4	2.220,7	16,3
I. Belanja pemerintah pusat	1.343,1	1.443,3	1.454,5	11,2
1. Belanja K/L	769,2	814,1	847,4	33,4
2. Belanja non-K/L	573,9	629,2	607,1	(22,2)
II. Transfer ke daerah dan dana desa	755,9	761,1	766,2	5,1
C. Keseimbangan primer	(144,3)	(78,4)	(87,3)	(9,0)
D. Surplus/(defisit)				
Anggaran (A-B)	(362,9)	(325,9)	(325,9)	(0,0)
% Surplus/(defisit)				
Anggaran terhadap PDB	(2,67)	(2,19)	(2,19)	(0,00)

Penanggulangan Kemiskinan 2018  
(Rp triliun)

Alokasi dana 283,7

### Rincian

- Subsidi 145,5
- Program Keluarga Harapan 17,3
- Program Indonesia Pintar 10,5
- JKN bagi warga miskin 25,5
- Bantuan pangan 20,8
- Bidik Misi 4,1
- Dana desa 60,0

Sumber: Kementerian Keuangan-L-1